

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga sektor publik. (Mardiasmo, 2018:1).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa setiap daerah diberi tanggung jawab untuk mengelola keuangannya sendiri. Maka dalam hal ini penyusunan laporan realisasi anggaran yang baik sangatlah penting untuk menilai kinerja keuangan pada instansi yang terkait. Dalam rangka mendukung sistem pemerintah guna memperbaiki kesejahteraan rakyat, saat ini otonomi daerah sudah memberlakukan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dikeluarkan lagi kebijakan tentang UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya agar tidak bertentangan dengan kebijakan dan dasar negara Indonesia.

Anggaran menjadi masalah rutin disebabkan rendahnya daya serap anggaran. Serapan anggaran yang tidak optimal menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolannya, akibat kelemahan dalam penyerapan anggaran mengakibatkan sering dilakukan revisi anggaran. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi. Alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan instansi atau daerah yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Liando dan Elim (2016)

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Anggaran digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi kedalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta sebagai rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus perhatian bagi kinerja pemerintah kantor kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya, dalam mengelola keuangan di tuntut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan anggaran, dana yang dianggarkan dan sudah digunakan untuk kegiatan operasional akan di evaluasi kembali melalui realisasi anggaran. Realisasi anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah di berikan kewenangan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun yang digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tertentu. Dari realisasi anggaran yang sudah digunakan akan dilaporkan melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Menurut Mahsun (2015:120) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi,efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pendapatan dinilai baik apa bila realisasinya lebih besar dari pada anggarannya, karena anggaran pendapatan merupakan batas minimal atas pendapatan yang harus diperoleh. Sebaliknya kinerja belanja dinilai baik apabila realisasinya tidak melampaui target anggarannya, sebab anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan (Mahmudi, 2016:66). Berdasarkan uraian penjelasan pendapatan dan belanja daerah yang berfluktuasi maka perlu dilakukan suatu penilaian atau pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan tingkat rasio efisiensi dan efektivitas agar pemerintah kecamatan kodi utara serta masyarakat umum dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai badan pendapatan daerah kecamatan kodi utara dalam mengelolah keuangan daerahnya. Hal ini juga menjadi jalan yang baik untuk menciptakan kecamatan kodi utara sebagai daerah yang tertib dan transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih (*good governance*) dimata publik. daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi,efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Astia Nur, dkk. (2015) "Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor. Penelitian ini menunjukkan Teknik dan kriteria efektivitas penerimaan anggaran belanja di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien.

Indah Nurfadillah (2018) "Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten bone". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun.

Kecamatan Kodi Utara merupakan kecamatan yang terletak dikabupaten Sumba Barat Daya dengan luas wilayah 253.73 Area (Km) dan memiliki 21 desa. Kecamatan Kodi Utara bertugas sebagai penyelenggaraan keuangan daerah dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintah, menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan. Laporan Realisasi Anggaran merupakan aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lain yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. *(sumber Data. Badan Pusat Statistik Sumba Barat Daya)*

Tidak terselenggaranya kemandirian daerah dikarenakan ketergantungan daerah terhadap dana transfer yang besar. Anggaran dana publik harus lebih besar realisasinya dibandingkan belanja aparatur daerah. Untuk kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kodi Utara sangat penting dalam efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan anggaran sebagai tolak ukur kinerja keuangan dari pertumbuhan pendapatan dan belanja tiap tahunnya. Mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan program yang dijalankan dan realisasinya sesuai target anggaran dapat melihat catatan laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Masalah yang sering terjadi dalam laporan realisasi anggaran adalah sering terjadinya fluktuasi, fluktuasi yaitu ketidaktepatan kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan pada pendapatan dan belanja daerah di tiap tahunnya. Bisa saja anggaran lebih besar dari realisasi dikarenakan kenaikan harga inflasi mendadak sehingga mempengaruhi penggunaan belanja dari anggaran atau adanya ketidakekonomisan penggunaan anggaran mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak tepat.

Kecamatan Kodi Utara sebagai salah kecamatan yang tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah, tidak memiliki pendapatan tersendiri dari camat sehingga menjadi suatu masalah penting karena pemerintah daerah hanya tergantung terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat dan tidak memiliki dana yang berasal dari usaha-usaha dari pemerintah daerah kecamatan tersebut. Pendapatan Asli daerah menjadi sangat penting dalam suatu entitas itu karena bisa membantu dengan

mengumpulkan dana dari usaha-usaha yang dibangun guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin/pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu, semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Tabel 1.1 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kodi Utara

No	Desa/ Kelurahan	Luas wilayah Total area (km ² /sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan
1	Hoha Wungo	5,22	2,14
2	Homba Karipit	7,16	2,94
3	Wailabubur	4,16	1,71
4	Noha	8,07	3,31
5	Waiholo	12,87	5,28
6	Kori	11,07	4,54
7	Kalena Rongo	3,20	1,31
8	Mangganipi	7,92	3,25
9	Kendu Wela	39,89	16,36
10	Bila Cenge	23,17	9,50
11	Bukambero	22,16	9,09
12	Waitaru	4,16	1,71
13	Homba Pare	9,94	4,08
14	Kadaghu Tana	13,13	5,39
15	Hameli Ate	7,39	3,03
16	Kadu Eta	16,73	6,86
17	Magho Linyo	17,73	7,27
18	Wee Wella	4,89	2,01
19	Nangga Mutu	6,50	2,67
20	Limbu Kemba	6,78	2,78
21	Morro Manduyo	11,68	4,79

Sumber data: Kecamatan Dalam Angka 2022

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2019-2021.

1.3 Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Camat Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya?

1.4 Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dari Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Kecamatan Kodi Utara Tahun 2019-2021.

1.4.1 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

Sebagai bahan masukan untuk Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan khususnya Fakultas Ekonomi dan lebih khususnya bagi jalur minat Akuntansi Sektor Publik. Sebagai suatu masukan dan sumbangan pemikiran bagi yang berminat melakukan penelitian dengan Judul yang sama.

2) Manfaat Praktiks

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya Di Kecamatan Kodi Utara, mengenai tingkat Efektivitas dan Efisiensi dari Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan.